



---

# LAPORAN KINERJA

## Stasiun KIPM Cirebon

### Triwulan IV Tahun 2024

**BPPMHKP**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON**

KANTOR & LABORATORIUM : JL. CIDENG INDAH NO.236 A  
KEDAWUNG CIREBON TELP/FAX (0231)-248857  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [op.skipmcirebon@kkp.go.id](mailto:op.skipmcirebon@kkp.go.id)

Nomor : B.13/SKIPM.CRB/TU.210/I/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

6 Januari 2025

Yth. Sekretaris BPPMHKP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan IV Tahun 2024, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024 Triwulan IV atas capaian indikator kinerja yang pelaksanaan kegiatan/komponennya telah diselesaikan selama periode Triwulan IV Tahun 2024. Berikut kami lampirkan Laporan Kinerja beserta lampirannya berupa Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun KIPM Cirebon,

Konseptor	Paraf
Kaur Umum	



R. Rudi Barmara

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon (LKj Stasiun KIPM Cirebon) Triwulan IV Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja setiap entitas atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam PK dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Stasiun KIPM Cirebon ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan masyarakat dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Landasan penyusunan LKj triwulan ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024 beserta realisasinya. Secara umum, pada Tahun 2024 Triwulan IV, seluruh target kinerja utama yang ditetapkan berhasil dicapai dengan kategori baik.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai media akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi, serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



Cirebon, 6 Januari 2024  
Kepala Stasiun KIPM Cirebon

R. Rudi Barmara

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Cirebon dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Badan KIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Stasiun KIPM Cirebon mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 14 IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2020 - 2024 yang telah direvisi terakhir pada Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, telah diukur capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 14 IKU/IK. Berdasarkan pengukuran kinerja dalam Aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja per Triwulan IV Tahun 2024 adalah 114,92%. Secara keseluruhan nilai kinerja organisasi (NKO) Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **114,92%** atau masuk dalam kriteria **Istimewa (biru)**, yaitu sebanyak 14 IKU/IK yang harus diukur telah melebihi target, sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp6.610.801.940,00 atau 98,09% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp6.739.468.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp128.666.060,00 atau 1,91%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 per akhir Desember yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar **99,99**.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Ikhtisar Eksekutif	iii	
Daftar Isi	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	I. Latar Belakang	1
	II. Arah Kebijakan	3
	III. Dasar Hukum	3
	IV. Tugas dan Fungsi	3
	V. Agenda SKIPM Cirebon	4
	VI. Dasar Pengukuran Kinerja	4
	VII. Tujuan Pengukuran Kinerja	5
	VIII. Ruang Lingkup	5
	IX. Waktu Pengukuran Kinerja	5
	X. Metodologi Pengukuran Kinerja	5
	XI. Sistematika Penyajian	6
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>7</b>
	I. Rencana Strategis 2020 -2024	7
	II. Rencana Kinerja Tahunan	9
	III. Penetapan Kinerja 2024	11
	IV. Program dan Kegiatan	13
	V. Rencana Aksi Pencapaian IKU	13
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>14</b>
	I. Pengelolaan Kinerja	14
	II. Capaian Kinerja	15
	III. Realisasi Rencana Aksi	35
	IV. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran	35
	V. Analisis Capaian Kinerja	36
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>38</b>
	I. Kesimpulan	38
	II. Permasalahan dan Saran Perbaikan	39
	III. Tindak Lanjut atas Permasalahan Periode Sebelumnya	39
<b>LAMPIRAN</b>		<b>40</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Cirebon wajib melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun berjalan untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Cirebon. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan motivasi dalam peningkatan kinerja Stasiun KIPM Cirebon serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Stasiun KIPM Cirebon dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Para Katimja, JF tertentu dan JF Umum.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Stasiun KIPM Cirebon saat ini berjumlah 41 orang pegawai terdiri dari 28 PNS dan 13 PPNPN/PJLP.

Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun KIPM Cirebon juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Struktur organisasi Stasiun KIPM Cirebon tergambar sebagaimana pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Cirebon

## **II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM CIREBON**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Cirebon disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan dan strategi SKIPM Cirebon sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPPMHKP Tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan BPPMHKP untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia, maka strategi Stasiun KIPM Cirebon adalah meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan. Strategi ini disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan BPPMHKP untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya:

1. Melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan produk perikanan memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor;
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Menyelenggarakan sosialisasi pengendalian mutu hulu-hilir untuk memberikan penyadaran akan pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Mengembangkan *early warning system*; dan
5. Meningkatkan nilai tambah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## **III. DASAR HUKUM**

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

## **IV. TUGAS - FUNGSI**

Sampai dengan saat Laporan Kinerja Triwulan IV disusun, organisasi dan tata kerja UPT di lingkup BPPMHKP – KKP belum terbit, sehingga Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan penerapan sistem manajemen mutu. Adapun tugas pencegahan dan pengawasan HPIK dan hayati ikan telah dilaksanakan oleh UPT Badan Karantina Indonesia (BKI).

## **V. AGENDA STASIUN KIPM CIREBON**

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. KKP. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen
3. Manajemen Mutu
4. Dukungan Manajemen

## **VI. DASAR PENGUKURAN KINERJA**

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

4. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
5. Revisi Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan Kepala BPPMHKP, tanggal 1 Oktober 2024.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-032.13.2.649732/2024, tanggal 24 November 2023.

## **VII. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk :

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

## **VIII. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup capaian kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Stasiun KIPM Cirebon dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Kepala BPPMHKP.

## **IX. WAKTU PENGUKURAN KINERJA**

1. Periode yang diukur : Oktober - Desember 2024
2. Waktu pengukuran : 1-10 Desember 2024

## **X. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Dialog Kinerja (Matriks Peran Hasil/MPH) Tahun 2024.
2. Pemantauan atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU.

## **XI. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyusunan laporan merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja, capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan realisasi rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.
- d. Bab IV – Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/ permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

# **BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA**

## **I. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

Sejalan dengan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Renstra Badan KIPM 2020-2024 menjadi dasar bagi Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk menyusun usulan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan BPPMHKP dan KKP.

Visi KKP untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Adapun visi – misi BPPMHKP dan Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Renstra 2020 – 2024 dan turunannya, dapat disampaikan sebagai berikut :

### **1. Visi**

Visi Stasiun KIPM Cirebon yang mengacu pada Visi KKP adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."

### **2. Misi**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP, yaitu: (1) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional; (2) Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (3) Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

### 3. Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT BPPMHKP yang mendukung/bertanggung jawab pada pencapaian agenda prioritas KKP dengan salah satu kebijakan “Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan” yaitu untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia, dengan indikator :

- a. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
- b. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

### 4. Sasaran Kegiatan

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan

dan Perikanan, maka Sasaran Kegiatan (SK) SKIPM Cirebon disesuaikan. Kondisi *outcome/impact* yang direncanakan dapat dicapai Stasiun KIPM Cirebon dari program yang dilaksanakan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Pada Tahun 2024, mengacu Sasaran Kegiatan BPPMHKP Stasiun KIPM Cirebon menetapkan 3 sasaran kegiatan, sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar; dan
- c. Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon .

## **II. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Mengacu pada revisi Perjanjian Kinerja (PK) pada tanggal 11 Oktober 2024, maka terdapat penyesuaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dan rincian output (RO) dalam dokumen perencanaan. Adapun IKU Stasiun KIPM Cirebon yang semula 16 IKU menjadi 14 IKU. Hal tersebut

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, dengan rincian IKK sebagai berikut :
  - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Cirebon, dengan rincian output :
    - Validasi Sertifikasi CPIB Budidaya (1 dokumen);
    - Validasi Sertifikasi CBIB ( 1 dokumen);
    - Sosialisasi Sertifikasi Produk Primer (1 laporan);
    - Bimbingan Teknis Sertifikasi Produk Primer (1 dokumen);
    - Bahan Uji Laboratorium ( 1 paket);
    - Inspeksi dan Verifikasi CPIB (1 lembaga).

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Cirebon, dengan rincian output :
    - Validasi Produk Pasca Panen (40 produk)
  - c. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan rincian output :
    - Pengambilan contoh uji pengawasan mutu hasil perikanan domestik periode I (1 laporan);
    - Pengambilan contoh uji pengawasan mutu hasil perikanan domestik periode II (1 laporan);
    - Pengadaan bahan uji laboratorium kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik (2 paket);
    - Pengadaan bahan uji laboratorium kegiatan impor (1 paket);
  - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan rincian output :
    - Investigasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan (1 laporan);
    - Koordinasi penanganan kasus penahanan/penolakan produk perikanan (1 laporan);
    - Registrasi UPI ke negara mitra atau negara tujuan ekspor (1 laporan);
    - Penerapan sistem *traceability* di UPI (9 UPI).
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan yang konsisten sesuai standar, dengan IKK :
- e. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan rincian output :
    - Reakreditasi ISO 17025 (1 unit kerja);
    - Surveilen ISO 17020 (1 unit kerja);
    - Penerapan standar metode pengujian (1 unit kerja).
3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan IKK :
- f. Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT Stasiun KIPM, dengan output bahan perlengkapan pelayanan dan pengujian laboratorium (3 laporan);

- g. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan output :
  - Peningkatan kualitas SDM (5 orang);
  - Peningkatan *Skill* Komunikasi Petugas Pelayanan (1 laporan).
- h. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan output :
  - Layanan pemantauan dan evaluasi (1 dokumen);
  - Layanan organisasi dan tata kelola internal (2 dokumen).
- i. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan output Layanan perencanaan dan penganggaran (12 bulan).
- j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan output Layanan Umum (12 bulan).
- k. Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan output Layanan umum (12 bulan).
- l. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan output Layanan pemantauan dan evaluasi (1 laporan).
- m. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan output pengelolaan PBJ (12 laporan).
- n. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan output :
  - Pengelolaan BMN (12 laporan);
  - Penghapusan BMN (1 laporan).

### **III. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024**

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP</b>				
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen</b>				
SK 3	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Cirebon	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Cirebon	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon ( <i>Indeks</i> )	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Lingkup Stasiun KIPM Cirebon) (Nilai)	93,76
		11	Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80

Sumber : PK Revisi yang telah ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan Kepala UPT pada 1 Oktober 2024

#### **IV. PROGRAM DAN KEGIATAN STASIUN KIPM CIREBON**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja BPPMHKP, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan 3 program, sebagaimana dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 revisi per Triwulan IV pada **Lampiran 1**.

#### **V. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Cirebon telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai IKU dan target waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi, Stasiun KIPM Cirebon dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 revisi per Triwulan IV sebagaimana pada **Lampiran 1**.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### I. PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka memantau capaian kinerja, manajemen melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi berbasis *website* [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai perkembangan capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Cirebon Nomor B.32/SKIPM.CRB/KP.440/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, tentang Tim Manajemen Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Cirebon.

Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, akan dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 3. Rentang penilaian capaian kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui capaian **14 IKU** dengan target yang ditentukan, sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (tanggal 1 Oktober 2024).

## II. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan dari Oktober s.d. Desember 2024. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2024, target Sasaran dan IKU yang diukur menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya dalam periode s.d Triwulan IV Tahun 2024. Target Sasaran dan IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan IKU/IK yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2024

NKO : 114.92%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Waktu perhitungan	Target 2024	Target TW IV	Capaian TW IV	%	Target Tahunan	Capaian Tahun 2024	%
<b>S.01</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>						<b>115,23</b>			<b>115,23</b>	
IKS.01.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.01.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.01.3	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120

IKS. 01.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99	99	99,9	100,9	99	99,9	100,9
<b>S.02</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar</b>						<b>118,71</b>			<b>118,71</b>	
IKS. 02.1	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	83,1	118,7	70	83,1	118,7
<b>S.03</b>	<b>Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon</b>						<b>110,81</b>			<b>110,81</b>	
IKS. 03.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Cirebon	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,36	3,81	113,4	3,36	3,81	113,4
IKS. 03.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	91,07	105,9	86	91,07	105,9
IKS. 03.3	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	85,5	104,3	82	85,5	104,3
IKS. 03.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71	71	95	120	71	95	120
IKS. 03.5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	93,76	99,99	106,6	93,76	99,99	106,6
IKS. 03.6	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100

IKS. 03.7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120	80	100	120
IKS. 03.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	84,34	105,4	80	84,34	105,4
IKS. 03.9	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	97,5	120	80	97,5	120

Keterangan: \* Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Seluruh IKU/IK target pada Triwulan IV Tahun 2024 tersebut, telah dilakukan pengukuran baik secara manual (LCK) maupun menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)). Pada Tabel 4, nilai capaian kinerja IKU Triwulan IV mencapai nilai **114,92%** secara keseluruhan (14 IKU), ditunjukkan melalui skor kinerja sebesar **114,92** yang masuk dalam kriteria **Istimewa** (biru). Hasil dari capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja atas 14 IKU yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2024 telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan (hijau/biru).

Capaian kinerja yang dihasilkan dari kinerja masing – masing IKU, mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan sasaran tersebut. Capaian kinerja masing–masing Indikator dari masing-masing Sasaran dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut :

**SK 01**  
**Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu  
hasil kelautan dan perikanan**

**IKU 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Formula perhitungan capaian IKU 1 adalah :

$\% X = (A+B+C+D+E+F) / xn * 100\%$  ; adapun A,B,C,D,E,F = persentase unit usaha yang menerapkan CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, dan CPIB di kapal; dan xn = jumlah dari unsur pembentuk (6 sertifikasi). Perkembangan capaian IKU ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian IKU 1 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70	70	100	120	100	120

Sumber : Laporan capaian kinerja triwulan IV. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Sampai dengan triwulan 4, dalam rangka pencapaian kinerja sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Cirebon, telah dilaksanakan Inspeksi penilaian Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal terhadap 6 unit kapal penangkapan dari 6 permohonan sertifikasi yang masuk, yaitu : 4 unit kapal di Kejawatan Cirebon (KM Irmaja, KM Samudra Jaya, KM Sumber Mas Jaya, KM Sinar Jaya) dan 2 unit kapal di Pelabuhan Karangsong, Indramayu (KM Dinasty dan KM Magdalena). Adapun sertifikasi yang lain belum ada permohonan. Oleh karenanya, capaian IKU 1 =  $\{(6/6) \times 100\} / 70\% \geq 120\%$  atau melebihi target triwulan IV sebesar 70%. Adapun capaian atas target tahunan sebanyak 120% atau 100% dari target 70%.

Keberhasilan capaian IKU pada triwulan IV yang mencapai 120% tersebut disebabkan adanya pelaksanaan sertifikasi CPIB di atas kapal sebanyak permohonan yang diminta pengguna jasa sebanyak 6 kapal. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dilaksanakannya inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB di atas kapal sesuai dengan permohonan yang masuk.

Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan pengendalian hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer sampai dengan triwulan IV sebesar Rp119.127.697,00 atau 73,18% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp162.786.000,00.

## **IKU 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM (%)**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor

Produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi pasca panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Formula perhitungan capaian IKU 2 adalah:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$
 yang mana A = Persentase Penerbitan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk (%); B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP, dan xn = jumlah dari unsur pembentuk. Perkembangan capaian IKU ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian IKU 2 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM (%)	70	70	100	120	100	120

Sumber : Laporan capaian kinerja triwulan IV. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id*

Pada triwulan IV terdapat penambahan 5 ruang lingkup baru (pada UPI PT Segara Makmur Sampurna dan PT Java Seafood) dan *upgrade* 3 ruang lingkup dari PT Andalan Samudera Jaya. Adapun seluruh ruang lingkup yang tersertifikasi selama Tahun 2024 sebanyak 23 ruang lingkup. Selain sertifikat HACCP, terdapat capaian berupa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

sebanyak 3 sertifikasi untuk PT Java Seafood. Oleh karena itu, capaian IKU produksi pasca panen selama tahun 2024 seluruhnya adalah :

$$\{(23/23*100\%) + (3/3 *100\%)/2\} *100\% = (200\%/2) * 100\% = 100\%.$$

Oleh karenanya, capaian IKU terhadap target triwulan IV juga tercapai yaitu  $= (100/70)\% = 120\%$  (sesuai dengan konversi perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id). Adapun capaian terhadap target tahunan juga tercapai juga sebesar 120%.

Keberhasilan capaian IKU sebesar 120% tersebut disebabkan meningkatnya ruang lingkup ekspor hasil perikanan sehingga UPI yang mengajukan sertifikasi HACCP meningkat. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah melaksanakan sertifikasi HACCP untuk ruang lingkup baru dan verifikasi HACCP tahunan atas UPI di wilayah administrasi Stasiun KIPM Cirebon.

Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi, Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI, dan CPIB pada supplier, sampai dengan triwulan IV sebesar Rp64.246.000,00 atau 90,92% dari pagu anggaran sebesar Rp70.660.000,00.

#### **IKU 4 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Pengawasan mutu dimaksud meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah RI yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil

perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya. Kegiatan pengawasan mutu periode triwulan IV terlaksana di 3 lokasi yaitu Kab. Indramayu, Kab. Cirebon dan Kota Cirebon. Formula perhitungan capaian IKU 3 adalah =

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A : Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI;

B : Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Tabel 7. Capaian IKU 4 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70	70	100	120	100	120

Sumber : Laporan capaian kinerja triwulan IV. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerja.kkp.go.id

Capaian IKU produksi pasca panen triwulan IV 2024 seluruhnya adalah :

$(3/3) * 100\% = 100\%$ ; sehingga capaian realisasi IKU =  $(100 / 70) * 100\% = 120\%$ . Capaian terhadap target tahunan juga tercapai 120%.

Keberhasilan atas pencapaian yang melebihi target triwulan IV sebesar 120% didukung karena lebih intensifnya kegiatan monitoring dan surveilen di sentra-sentra penyediaan produk hasil perikanan domestik, termasuk pada Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru yang lalu. Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring ikan sehat dan bermutu di sentra penyediaan pangan sehat domestik secara berkala.

Pada triwulan IV, realisasi anggaran atas Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik sampai dengan triwulan IV mencapai Rp63.935.881,00 atau 92,93% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp68.803.000,00.

#### **IKU 4 Rasio ekspor hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)**

Rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah (jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat

mutu dikurangi penolakan oleh Negara tujuan)/Jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan x 100% atau  $X = (A-B)/A * 100\%$ ; dimana :

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Periode pengukuran IKU ini triwulan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian IKU 4 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	%Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan *)
Rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99%	99%	100%	101,01%	99,99%	101,00%

Sumber : Hasil pengolahan data ekspor hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Cirebon. Terdapat perubahan target pada Revisi PK Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 (Triwulan IV)

\*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)

Jumlah permohonan sertifikasi ekspor hasil perikanan pada triwulan IV sebanyak 266 HC tanpa kasus penolakan oleh negara mitra maupun non mitra. Adapun faktor pendukung keberhasilan atas pencapaian target rasio yang masih melebihi target triwulan IV yaitu 101,01% (=  $100/99 * 100\%$ ) dan atas target tahunan yaitu 101,00% (=  $99,99/99,00 * 100\%$ ) adalah karena kehati-hatian eksportir dalam memenuhi persyaratan ekspor terkait penanganan produk oleh negara tujuan ekspor baik secara administrasi maupun *quality controll* produk. Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan ekspor baik secara administrasi maupun *quality* produk.

Pada triwulan IV, realisasi anggaran atas komponen sertifikasi mutu (ekspor) secara keseluruhan sampai dengan triwulan IV mencapai Rp54.557.650,00 atau 90,18% dari pagu anggaran sebesar Rp60.500.000,00. Anggaran yang tersedia pada triwulan IV ini beralih ke komponen Survelen dalam rangka penerbitan sertifikat HC mutu dari komponen yang semula Sertifikasi Kesehatan Ikan, karena SKI sudah beralih ke Badan Karantina Ikan.

**SK 02**  
**Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar**

**IKU 5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020, yang dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Formulasi perhitungan IKU 5 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = persentase nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi;

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020;

B = Presentase Penerapan ISO 17025.

Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Capaian IKU 5 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan *)
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	70%	70%	100%	120%	100%	120%

Sumber : Terdapat perubahan target pada Revisi PK Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 (Triwulan IV)

\*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU 5 atas target triwulan IV sebesar 120% ( $= 100/70 * 100\%$ ) dan capaian atas target tahunan sebesar 120%. Keberhasilan capaian kinerja IKU 5 ini didukung karena telah dilaksanakannya survailen ke-2 SNI ISO/IEC 17020:2015 pada triwulan II Tahun 2024. Dan telah dilaksanakan pula re-akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada triwulan III, sesuai dengan target survailen SNI ISO/IEC 17020:2015 dan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada tahun 2024. Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi dan melakukan *Continuous Improvement*.

Pada triwulan IV, realisasi anggaran atas Penguatan Sistem Manajemen Mutu laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon sampai dengan triwulan IV mencapai Rp77.018.847,00 atau 96,27% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp80.000.000,00.

**SK 03**  
**Tata kelola Pemerintahan yang Baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon**

### **IKU 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Untuk memperoleh nilai SKM

unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang total unsur yang terisi}$$

Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 6 seperti pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian IKU 6 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Indeks kepuasan masyarakat layanan Stasiun KIPM Cirebon (indeks)	3,36 (84,00)	3,36	3,81 (= 95,32)	113%	3,81	113%

Sumber : *website* ptsp.kkp.go.id (nilai konversi target menjadi indeks adalah =  $84,00/25 = 3,36$ )

Pada triwulan IV telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah diprogramkan setiap triwulan menggunakan alat bantu kuesioner berbasis digital dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,81 dari target 3,36 sehingga capaian IKU sebesar 113%. Metode pengisian survei adalah pengisian secara langsung oleh pengguna layanan/jasa pada setiap kegiatan pemberian layanan melalui sistem yang terintegrasi dengan *website* ptsp.kkp.go.id.

Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan peningkatan pelayanan publik secara prima dan pembenahan fasilitas layanan yang lebih memadai. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah berusaha konsisten dalam melayani masyarakat pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan prima dan melakukan tindakan perbaikan atas saran hasil survei. Dalam hal realisasi anggaran untuk pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen/alokasi anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2024.

#### **IKU 7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugastugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

(Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Periode pengukuran IKU semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 7 seperti pada tabel berikut.

Tabel 11. Capaian IKU 7 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
IP ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	86	86	91,07	106%	91,07	106%

Sumber : <http://ropeg.kkp.go.id>

Pada semester II ini telah dilakukan pengukuran capaian IKU 17 menggunakan alat bantu berbasis digital <http://ropeg.kkp.go.id> dengan capaian IP ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 91,07 dari target 86,00 sehingga capaian IKU sebesar 106%. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan pro aktifnya pegawai mencari informasi dan meningkatkan kompetensinya sebagai ASN, baik secara luring maupun daring.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Cirebon adalah menyusun rencana peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi secara berkala. Sampai dengan triwulan IV, realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM lingkup Stasiun KIPM Cirebon sebesar Rp10.551.550,00 atau 68,78% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp15.340.000,00.

#### **IKU 8 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi Instansi Pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi anggaran (input) atau kegiatan (output) menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai atas penilaian mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Cara menghitung capaian nilai PM SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat mitra dari Unit Eselon I, namun jika Itjen KKP tidak melakukan penilaian terhadap UPT, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP. Periode pengukuran IKU semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 8 seperti pada tabel berikut.

Tabel 12. Capaian IKU 8 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (nilai)	82	82	85,5	104%	85,5	104%

Sumber : LKE pada aplikasi [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)

Dalam rangka implementasi sistem AKIP, telah disusun Manual IKU, Laporan Kinerja triwulanan dan LKj Tahunan. Capaian nilai mandiri sistem AKIP senilai 85,5 atau 104% dari target nilai 82,0. Keberhasilan tersebut disebabkan pada Tahun 2024, Stasiun KIPM Cirebon berusaha memenuhi dan mengimplementasikan sistem AKIP yang terakomodir pada seluruh aspek penilaian, mencakup aspek kepatuhan dalam menyediakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi, mengukur capaian kinerja sesuai dengan pedoman, dan menyampaikan Laporan Kinerja baik kepada Pimpinan internal maupun eksternal (MENPAN dan RB melalui aplikasi ESR) secara tepat waktu.

Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi antar anggota tim akuntabilitas UPT baik perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi rekonsiliasi dokumen, data dan informasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon. Realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal UPT sampai dengan triwulan IV sebesar Rp57.035.572,00 atau 99,81% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp57.143.000,00.

## **IKU 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target NKA TA 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), yaitu : Sangat Baik, apabila NKA > 90; Baik, apabila NKA >80 – 90; Cukup, apabila NKA >60 – 80; Kurang, apabila NKA >50 – 60; dan Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 9 seperti pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian IKU 9 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71	71	95	120%	95	120%

Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Sampai dengan triwulan IV TA 2024, nilai kinerja perencanaan anggaran mencapai 95,00 atau capaian kinerja sebesar 120% dari target 71. Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan pada Tahun 2024, Stasiun KIPM Cirebon optimalnya penyerapan anggaran, kesesuaian antara realisasi dan rencana anggaran, dan kepatuhan UPT dalam menerapkan SBK sebagai pedoman penganggaran.

Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan mengupayakan menyusun perencanaan dengan matang, tidak melakukan revisi DIPA yang

dapat menghambat/menunda pelaksanaan kegiatan, dan berupaya tidak adanya deviasi halaman III DIPA. Realisasi anggaran komponen/kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp55.035.572,00 atau 99,80% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp55.143.000,00.

### **IKU 10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekonsiliasi LPJ, rencana kas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Periode pengukuran IKU setiap semester dan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 10 seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Capaian IKU 10 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	93,76	93,76	99,99	107%	99,99	107%

Sumber : Aplikasi OMSPAN KEMENKEU

Secara akumulasi, sampai dengan semester 2 TA 2024, nilai IKPA mencapai 99,99 dari target 93,76 atau capaian kinerja IKU 10 sebesar 107%. Keberhasilan tercapainya target tersebut disebabkan tercapainya kualitas perencanaan anggaran sebesar 100%; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,97%; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Cirebon dalam mencapai IKU tersebut antara lain berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga penilaian indikator deviasi halaman III DIPA lebih menjadi optimal. Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Umum

dalam rangka mendukung capaian penilaian IKPA Tahun 2024 ini sebesar Rp35.540.000,00 atau 96,44% dari pagu anggaran sebesar Rp35.814.000,00.

### **IKU 11 Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Formula perhitungan realisasi IKU = (Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon yang ditindaklanjuti/ Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon) \*100%. Periode pengukuran IKU tahunan dan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU 11 seperti pada tabel berikut.

Tabel 15. Capaian IKU 11 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas KKP

Realisasi capaian IKU persentase penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Cirebon diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 substansi lingkup BPPMHKP yang telah ditindaklanjuti seluruhnya, yaitu temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan tubel PNS SKIPM Cirebon a.n. Saefudin senilai Rp1.850.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara seluruhnya dengan tuntas. Keberhasilan capaian kinerja atas target tersebut didukung dengan telah dilaksanakannya tindak lanjut atas temuan kerugian negara seluruhnya 100% tuntas.

Upaya yang dilakukan UPT dalam mencapai IKU tersebut antara lain dengan konsisten melakukan pengendalian intern untuk meminimalisir adanya temuan kerugian negara dan kelemahan SPI dalam pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup UPT. Dalam

hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2024.

**IKU 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada SKIPM Cirebon berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan/LHP (terbatas pada Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit s.d. triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh SKIPM Cirebon yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan (jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP melalui Laporan Hasil Pengawasan) x 100%. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 12 seperti pada tabel berikut.

Tabel 16 Capaian IKU 12 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	80%	80%	100%	120%	100%	120%

Sumber : Data diolah dari aplikasi SIDAK (ITJEN KKP). Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pengukuran capaian dilakukan pada triwulan IV dengan menghitung persentase tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan dan memanfaatkan rekomendasi tersebut untuk perbaikan kinerja di lingkup SKIPM Cirebon. Bukti dukung hasil tindak lanjut *diupload* dan disampaikan ke Tim PTL Itjen melalui aplikasi pengawasan SIDAK. Sampai dengan akhir Tahun 2024, Stasiun KIPM Cirebon mampu mempertahankan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebagai perbaikan kinerja dengan capaian 100% dari target 80% yang ditunjukkan dengan informasi data dalam aplikasi SIDAK. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 120% tersebut disebabkan rekomendasi hasil pengawasan telah 100% ditindaklanjuti secara tuntas untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain memperbaiki kinerja pegawai dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan, seperti menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2024.

### **IKU 13 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon**

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, yaitu : rencana umum pengadaan telah di *upload* ke dalam aplikasi SIRUP (20%); persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); laporan penyelenggaraan PBJ (20%); dan kesesuaian tahap pelaksanaan (30%). Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 13 seperti pada tabel berikut.

Tabel 17 Capaian IKU 13 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Tingkat kepatuhan PBJ lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80%	80%	84,34%	105%	84,34	105%

Sumber : Resume hasil penilaian/evaluasi tingkat kepatuhan PBJ lingkup Eselon I –BPPMHKP Tahun 2024 oleh Itjen KKP

Penilaian tingkat kepatuhan PBJ Stasiun KIPM Cirebon mencapai 84,34% atau 105% dari target 80%. Nilai maksimumnya 100%, adapun nilai capaian Stasiun KIPM Cirebon telah melebihi target pada PK Tahun 2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh pencapaian nilai tingkat kepatuhan PBJ yang ditentukan oleh faktor-faktor : (a) ketersediaan manajemen risiko PBJ strategis BPPMHKP; (b) perencanaan dan persiapan pengadaan; (c) persentase pemilihan PBJ yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE); (d) kesesuaian tahap pelaksanaan; (e) laporan penyelenggaraan PBJ; dan (f) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada triwulan I s.d. III Tahun 2023. Upaya yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai kinerja tersebut adalah mengoptimalkan pelaksanaan PBJ dan administrasi dokumen PBJ Stasiun KIPM Cirebon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan faktor penilaian tersebut. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dalam rangka mendukung capaian penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ ini sebesar Rp32.518.500,00 atau 77,42% dari pagu anggaran sebesar Rp42.000.000,00.

#### **IKU 14 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon**

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup BPPMHKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain (a) pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%); (b) tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%); (c) tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%); (d) penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%); (e) penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Tabel 18 Capaian IKU 14 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80%	80%	97,5%	120%	97,5%	120%

Sumber : Resume hasil penilaian/evaluasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Tahun 2024 oleh Sekretaris BPPMHKP

Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon mencapai 97,50% atau 120% dari target 80,00%. Keberhasilan tersebut didukung oleh upaya satker dalam memanfaatkan RKBMN yang telah disusun, mengusulkan PSP BMN UPT secara tertib, mengusulkan penghapusan untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang, menggunakan BMN yang sudah

dibelanjakan sesuai peruntukannya, serta menyusun Laporan BMN secara tepat waktu.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Cirebon adalah melakukan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, tertib dan mendokumentasikan secara lengkap. Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Umum dalam rangka mendukung Pengelolaan BMN sebesar Rp34.788.500,00 atau 78,53% dari pagu anggaran sebesar Rp44.300.000,00.

### **III. REALISASI RENCANA AKSI**

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dilakukan evaluasi secara periodik, minimal triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana aksi pencapaian perjanjian kerja Tahun 2024 sebagaimana **terlampir**.

Kegiatan pendukung pencapaian 14 IKU Tahun 2024 berjumlah sekitar 31 kegiatan. Pada periode pengukuran triwulan IV Tahun 2024, seluruh IKU telah mencapai/melampaui target.

### **IV. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN TW IV TAHUN 2024**

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon s.d. Triwulan IV TA 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp6.610.801.940,00 atau 98,09% dari pagu anggaran yang dikelola setelah revisi yaitu sebesar Rp6.739.468.000,00 sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp128.666.060,00 atau 1,91%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV Tahun 2024 yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN sebesar 99,99.

## **V. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TA 2024 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Stasiun KIPM Cirebon telah melakukan perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024.

Berdasarkan target kinerja Tahun 2024 yang mengalami revisi pada 1 Oktober 2024 semula 16 IKU menjadi 14 IKU, seluruh IKU tersebut dilakukan pengukurannya pada triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 4. Seluruh IKU yang diukur mencapai/melebihi target yang ditetapkan ( $\geq 100\%$ ). Hasil analisis terbatas terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024 dengan membandingkan terhadap target setahun pada TA 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan *Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan secara profesional dan partisipatif*, dicapai dengan 4 IKU, yaitu :

IKU 1 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;

IKU 2 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;

IKU 3 - Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;

IKU 4 - Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 101%.

Atas capaian 4 IKU tersebut diketahui bahwa capaian kinerja mencapai 115,23% atau melebihi target 100%, sehingga kinerja sasaran kegiatan yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tahun berikutnya.

2. Sasaran kegiatan *Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar*, dicapai dengan 1 IKU, yaitu :

IKU 5 - Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 119%.

Atas capaian IKU 5 pada triwulan IV diketahui bahwa hasil kinerja sasaran mencapai 119% atau melebihi target 100%, sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tahun berikutnya.

3. Sasaran kegiatan *Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon*, dicapai dengan 9 IKU, yaitu :

IKU 6 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 113%;

IKU 7 - Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 106%;

IKU 8 - Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 104%;

IKU 9 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;

IKU 10- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 107%;

IKU 11- Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 100%;

IKU 12- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;

IKU 13- Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 105%; dan

IKU 14- Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%.

Atas capaian 9 IKU pada triwulan IV diketahui bahwa capaian kinerja sasaran kegiatan mencapai 110,81% atau melebihi 100%, sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tahun berikutnya.

# BAB IV

## PENUTUP

### I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Cirebon Triwulan IV Tahun 2024 menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Cirebon selama triwulan IV Tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan IV Tahun 2024 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Manajemen Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan VI Tahun 2024 adalah **Istimewa**, dengan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (**NPSS**)/Skor Kinerja IKU Triwulan IV Tahun 2024 mencapai **114,92**; demikian juga secara keseluruhan IKU sebesar **114,92** atau secara umum capaian kinerja di atas target sehingga kinerja perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Seluruh IKU (14 IKU) yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024, seluruhnya telah mencapai atau melebihi target.
3. Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon s.d. Triwulan IV TA 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp6.610.801.940,00 atau 98,09% dari pagu anggaran yang dikelola setelah revisi yaitu sebesar Rp6.739.468.000,00 sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp128.666.060,00 atau 1,91%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV Tahun 2024 yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN sebesar 99,99.

## **II. PERMASALAHAN & SARAN PERBAIKAN**

Selama proses pencapaian dan pengukuran capaian kinerja selama triwulan IV ini tidak terdapat kendala yang mengganggu pencapaian IKU organisasi, hanya terjadi perubahan/pergeseran dan revisi kegiatan teknis dan anggaran yang pada awal triwulan IV berpengaruh pada perubahan nomenklatur dan target IKU. Atas permasalahan tersebut, UPT lingkup BPPMHKP disarankan untuk melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja terkait IKU dan targetnya, beserta anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Tahun 2024.

## **III. TINDAK LANJUT ATAS PERMASALAHAN PERIODE SEBELUMNYA**

Sehubungan dengan saran perbaikan triwulan III bahwa UPT agar melakukan penyesuaian target dengan menunggu arahan selanjutnya dari Sekretaris BPPMHKP. Atas saran tersebut, Kepala SKIPM Cirebon melakukan koordinasi secara *online* (WA Group) dengan Timja Dukman Sekretariat BPPMHKP dalam rangka penyusunan perubahan/revisi Perjanjian Kinerja.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON**

JALAN CIDENG INDAH 236 A KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON 45153

TELEPON (0231) 248857

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id), SUREL [op.skipmcirebon@kkp.go.id](mailto:op.skipmcirebon@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. Rudi Barmara**  
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan

**Ishartini**

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Cirebon

**R. Rudi Barmara**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN CIREBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	86
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	82
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	93,76
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	80

## Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.016.976.000
2.	Manajemen Mutu	603.500.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	466.500.000
<b>Total Anggaran Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024</b>		<b>7.086.976.000</b>

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Cirebon



R. Rudi Barmara



# RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2024 REVISI

## SKIPM CIREBON



## **KATA PENGANTAR**

Kinerja suatu unit kerja/organisasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi atas pencapaian yang telah ditargetkan oleh unit kerja tersebut pada periode waktu tertentu. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan unit organisasi di lingkup KKP dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi yang baru terutama di bidang primer dan pasca panen disusunlah revisi rencana aksi kegiatan. Rencana aksi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerjanya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024 ini. Kami sangat berkenan jika ada masukan/saran yang membangun dalam rangka perbaikan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini, dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi yang berkepentingan. Terima kasih.



**Cirebon, 10 Oktober 2024**  
**Kepala,**

**R. Rudi Barmara, S.Pi, M.P.**  
**NIP 19690414 199203 1 005**



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan																	
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des						
	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Investigasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan	8,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
				Koordinasi penanganan kasus penahanan/penolakan produk perikanan	12,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				Registrasi UPI ke negara mitra atau negra tujuan ekspor	10,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Penerapan sistem traceability di UPI	10,000,000	UPI	9	-	1	2	4	4	6	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Reakreditasi ISO 17025	80,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1			
					Surveiln ISO 17020	15,500,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Penerapan standar metode pengujian	7,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	6	Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	Ketua Timja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Bahan Perlengkapan Pelayanan dan Pengujian Laboratorium	34,600,000	Laporan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3			
					Perjalanan dinas Peningkatan Kualitas SDM	15,480,000	Orang	5	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	5	5	5			
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Peningkatan Skill Komunikasi Petugas Pelayanan	40,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
					Layanan pemantauan dan evaluasi	2,000,000	Dokumen	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Layanan organisasi dan tata kelola internal	10,000,000	Dokumen	2	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Layanan perencanaan dan penganggaran	58,860,000				Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12					

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon)	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Layanan Umum	43,340,000	Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11 Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Layanan Umum	43,340,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Layanan pemantauan dan evaluasi	2,000,000	Laporan	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Pengelolaan PBJ	329,026,000	Laporan	11	-	2	5	5	5	5	6	9	10	10	10	11
	14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Pengelolaan BMN	42,000,000	Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penghapusan BMN	2,300,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Cirebon, 10 Oktober 2024  
Kepala SKIPM Cirebon

*Rudi Barmara*

R. Rudi Barmara, S.Pi.,M.P.  
NIP. 19690414 199203 1 005